

Judul : ASN akan mendapat THR lebih besar
Tanggal : Minggu, 17 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

HARI RAYA

ASN Akan Mendapat THR Lebih Besar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah menetapkan kebijakan tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke-13 tahun 2022 bagi aparatur sipil negara dan pensiunan. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang mulai membaik pasca-pandemi, serta untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global, tunjangan hari raya tahun ini akan diberikan lebih besar daripada tahun 2020 dan 2021.

Kebijakan mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022. Anggaran yang dialokasikan untuk ASN pusat yang bekerja di kementerian/lembaga dan TNI/Polri adalah Rp 10,3 triliun.

Sementara itu, untuk ASN yang bekerja di daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 15 triliun yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dapat ditambahkan dari APBD 2022 sesuai dengan kemampuan fiskal setiap daerah. Adapun alokasi anggaran untuk THR pensiunan sebesar Rp 9 triliun, berasal dari pos bendahara umum negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers daring, Sabtu (16/4/2022), mengatakan, untuk THR tahun ini dilakukan penyesuaian besaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komposisi THR diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok, tunjangan yang melekat pada gaji (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan), serta tambahan 50 persen tunjangan kinerja.

Adapun ASN pusat yang akan menerima THR tahun ini sebanyak 1,8 juta orang, ASN daerah sebanyak 3,7 juta orang, dan pensiunan 3,3 juta orang.

"Jadi, besarnya akan lebih besar daripada tahun 2021. Kebijakan THR dan gaji ke-13 ini diharapkan bisa menjadi faktor yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus untuk terus membantu pemulihan ekonomi Indonesia," kata Sri Mulyani.



Sri Mulyani Indrawati

Mengalami penyesuaian

Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 dan 2021, karena tekanan dampak pandemi Covid-19, kebijakan THR mengalami penyesuaian. Tahun 2020, THR hanya diberikan kepada aparatur negara yang jabatannya di bawah eselon II serta untuk para pensiunan. Komposisi THR dan gaji ke-13 yang dibayarkan juga hanya berupa gaji/pensiunan pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan yang melekat.

Sementara itu, pada tahun 2021, THR dan gaji ke-13 mulai dibayarkan kepada semua aparatur negara dan pensiunan. Namun, besarnya masih sama dengan tahun 2020, yakni hanya terdiri dari gaji/pensiunan pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan yang melekat.

Pencairan THR tahun ini akan dimulai 10 hari sebelum Idul Fitri, sedangkan gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juli 2022. Gaji ke-13 diharapkan dapat menunjang kebutuhan belanja pendidikan bagi anak-anak ASN menjelang tahun ajaran baru.

"Dalam hal THR belum bisa dibayarkan sebelum Idul Fitri karena masalah teknis, bisa dibayarkan sesudah Idul Fitri. Namun, kami berharap semua bisa dibayarkan sebelum Idul Fitri," kata Sri Mulyani.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjoe Kumolo mengatakan, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini merupakan wujud penghargaan

(Bersambung ke hlm 15 kol 5-7)

ASN Akan Mendapat THR Lebih Besar

(Sambungan dari halaman 1)

atas kontribusi ASN di pusat dan daerah selama dua tahun terakhir ini dalam membantu penanganan pandemi Covid-19. Selain pembayaran THR dan gaji ke-13, pemerintah juga kembali meningkatkan ASN untuk melakukan mudik hari raya.

"Ini apresiasi atas kontribusi aparatur pemerintah di pusat dan daerah, yang tidak hanya menggerakkan dan mengorganisasi di lingkungan pemerintah, tetapi juga di lingkungan masing-masing," katanya.

Terbitkan perda

Kementerian Dalam Negeri pun memerintahkan kepala daerah untuk segera menerbitkan peraturan daerah (perda) terkait pengaturan teknis pencairan THR dan gaji ke-13.

"Mendagri meminta kepada semua kepala daerah untuk segera menindaklanjuti arahan Presiden berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah ada," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro.

Ia mengatakan, pemberian THR dan gaji ke-13 dapat memanfaatkan sumber pendanaan di APBD 2022 dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal setiap pemerintah daerah.

Daerah yang alokasi anggarannya tidak cukup diwajibkan mengoptimalkan alokasi anggaran belanja pegawai

dalam APBD-nya untuk tetap menyediakan anggaran pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2022.

Jajaran gubernur juga diharapkan memantau pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyediaan alokasi anggaran tersebut. "Pengelolaan anggaran THR dan gaji ke-13 ini tentunya harus tetap dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan aturan undang-undang dan memperhatikan pengelolaan keuangan daerah," kata Suhajar.

Sebelumnya, pada Kamis lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan, pihaknya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk semua aparatur sipil negara, TNI-Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun, dan pejabat negara pada 13 April 2022. Kebijakan ini merupakan wujud penghargaan atas kontribusi aparat pusat dan daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, disampaikan Presiden, diberikan juga tambahan tunjangan kinerja 50 persen untuk ASN dan TNI-Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja.

"Diharapkan (THR dan tambahan tunjangan) menambah daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR

dan gaji ke-13 akan diatur dengan peraturan menteri keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan peraturan kepala daerah untuk yang bersumber dari APBD," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pernyataan tentang mudik dan pemberian tunjangan hari raya serta gaji ke-13 tahun 2022, di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah membolehkan perjalanan mudik dengan menimbang kondisi pandemi Covid-19 yang terkendali. Masyarakat dapat kembali merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak keluarga di kampung halaman. Namun, semua warga diminta tetap waspada agar jangan sampai perjalanan mudik justru memicu munculnya gelombang baru penularan Covid-19.

Apalagi, arus mudik tahun ini diperkirakan akan sangat besar. "Menurut laporan yang saya terima, diperkirakan ada 23 juta mobil pribadi dan 17 juta sepeda motor yang akan melakukan perjalanan mudik di Pulau Jawa saja," kata Presiden.

Presiden Jokowi menuturkan, semua pihak tentu sangat menginginkan perjalanan mudik lancar dan penuh kegembiraan. Hal yang terpenting, pemerintah selalu meletakkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, baik keselamatan selama perjalanan mudik maupun keselamatan kesehatan. (AGE)